



PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2019 – 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan hidayah -Nya semata penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) tahun 2019 - 2024 Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (P-RENSTRA) ini sangatlah penting artinya bagi Kecamatan Dukun karena selain sebagai bahan pegangan dalam menjalankan tugas baik yang bersifat rutin maupun program-program lain yang akan dilaksanakan. Juga sebagai acuan atas pelaksanaan tugas yang sedang dilaksanakan maupun pelaksanaan tugas-tugas kedepan guna meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.

Namun kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Perubahan Renstra ini masih jauh dari keesempurnaan, untuk itu kami menerima kritik atau saran yang bersifat membangun yang senantiasa kami harapkan guna kesempurnaan dalam penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019- 2024.

Akhirnya kami berharap agar Perubahan Renstra Kecamatan Dukun ini dapat berguna, baik untuk aparatur Pemerintah maupun masyarakat pada umumnya.

Dukun, 27 Oktober 2021

CAMAT DUKUN



NUR IMAN, S.Sos

Pembina TK I

NIP. 19650112 198603 1 014

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	2
1.4 Sistematika Penulisan	3
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah ...	6
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah ..	16
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	17
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi	20
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	20
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	22
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	24
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	25
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	31
BAB VII PENUTUP	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Peta Administrasi Kecamatan Dukun

Gambar 2.2 Bagian Struktur Organisasi Kecamatan Dukun

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Data Pegawai Kecamatan Dukun tahun 2021
- Tabel 2.2 Data Aset Kecamatan Dukun Tahun 2021
- Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang 2019 – 2024
- Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 -2024
- Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- Tabel 3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2019-2024
- Tabel 3.3 Telaah RTRW dan KLHS pada RPJMD
- Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Pada Perangkat Daerah
- Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
- Tabel 6.1 Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
- Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Dukun Tahun 2019-2024
- Tabel 7.2 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana perangkat daerah terdiri atas: (1) Renstra Perangkat Daerah; dan (2) Renja Perangkat Daerah.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan
- f. Penetapan.

Sebagaimana ketentuan Pasal 344 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah

Daerah, dinyatakan bahwa tahapan penyusunan RPJMD sebagaimana berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Perubahan RPJMD. Dengan demikian, tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah juga berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah karena penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan proses satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penyusunan RPJMD.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 disusun dalam rangka menindaklanjuti Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Perubahan Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019-2024 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 dan menyesuaikan terhadap kebijakan nasional (RPJMN 2020-2024 dan Renstra K/L Tahun 2020-2024), dampak pandemi covid 19 dan adanya dinamika perubahan regulasi (PP 12 Tahun 2019, Permendagri 90/2019 dan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020).

1.2 Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan;
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 -2024;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kodifikasi, Klasifikasi Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
- h. Keputusan Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil erifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
- i. Surat Edaran Bupati Magelang Nomor:050/1098/24/21 tanggal 25 Mei 2021 tentang Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 – 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Perubahan Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019-2024 disusun dengan maksud sebagai acuan bagi Kecamatan Dukun dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Dukun Tahun 2022 dan Renja Tahun 2023 dan 2024.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019 – 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyesuaikan gambaran tentang kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini;
- b. Menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap perubahan kemampuan keuangan daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019-2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dengan renja Perangkat Daerah. Dalam latar belakang juga disebutkan argumentasi tentang penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah diantaranya sebagai tindak lanjut Perubahan RPJMD, penyesuaian terhadap kebijakan nasional, dampak pandemi covid 19 dan adanya dinamika perubahan regulasi.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang – undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi.
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran /target Renstra Perangkat Daerah.
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra K/L, hasil telaahan terhadap RTRW, hasil analisis terhadap KLHS dan hasil evaluasi kinerja pelayanan Perangkat Daerah yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah.

Bab III Permasalahan dan Isu – isu Strategis Perangkat Daerah

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
Pada bagian ini dikemukakan permasalahan –permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor – faktor yang mempengaruhinya.
- 3.2 Telaahan, Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah berikut evaluasi pelaksanaannya pada tahun 2020.
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi
Bagian ini mengemukakan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong daeri pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari evaluasi pelaksanaan sasaran jangka menengah Renstra K/L tahun 2020- 2024 atau Renstra PD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 – 2023.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikekmukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan hasil KLHS Perubahan Kabupaten Magelang.

3.5 Penentuan Isu –isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan Perangkat Daerah.

Bab IV Tujuan dan Sasaran

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah berdasarkan hasil penyusunan kertas kerja Perubahan Renstra Perangkat daerah.

Bab V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yang menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD dengan tujuan, sasaran strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah.

Bab VI Rencana Program dan Kegiatan seta Pendanaan

Pada bagian ini dikemukakan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah berdasarkan hasil cascading yang dilakukan.

Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Bab VIII Penutup

Pada bab ini berisikan catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaan maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah – kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

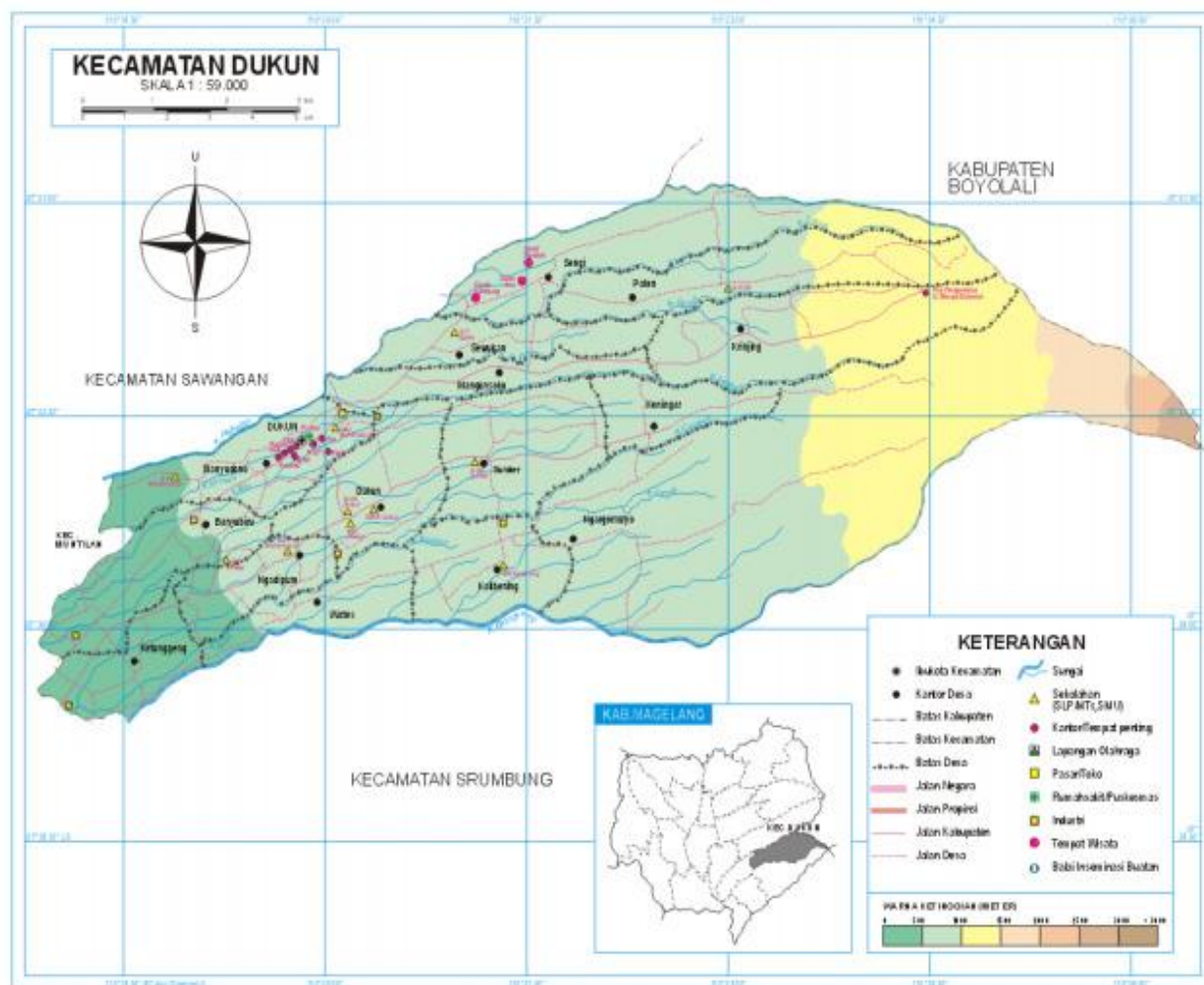
BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang merupakan salah satu Kecamatan di wilayah Kabupaten Magelang dengan \pm Luas 53.40 KM². Berdasarkan data Kecamatan Dukun Dalam Angka Tahun 2020, jumlah penduduk Kecamatan Dukun 47.110 jiwa dengan proporsi penduduk laki-laki 23.532 jiwa dan penduduk perempuan 23.578 jiwa. Wilayah Kecamatan Dukun terbagi atas 15 Desa.

Batas wilayah Kecamatan Dukun adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Sawangan
- b. Sebelah Timur : Kabupaten Boyolali/Gunung Merapi
- c. Sebelah Selatan : Kecamatan Srumbung
- d. Sebelah Barat : Kecamatan Muntilan



(Sumber : Kecamatan Dukun Dalam Angka , 2020)

Gambar 2.1 : Peta Administrasi Kecamatan Dukun

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun

Kecamatan Dukun dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang. Berdasarkan Peraturan Bupati

Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagai berikut:

a. Tugas kecamatan

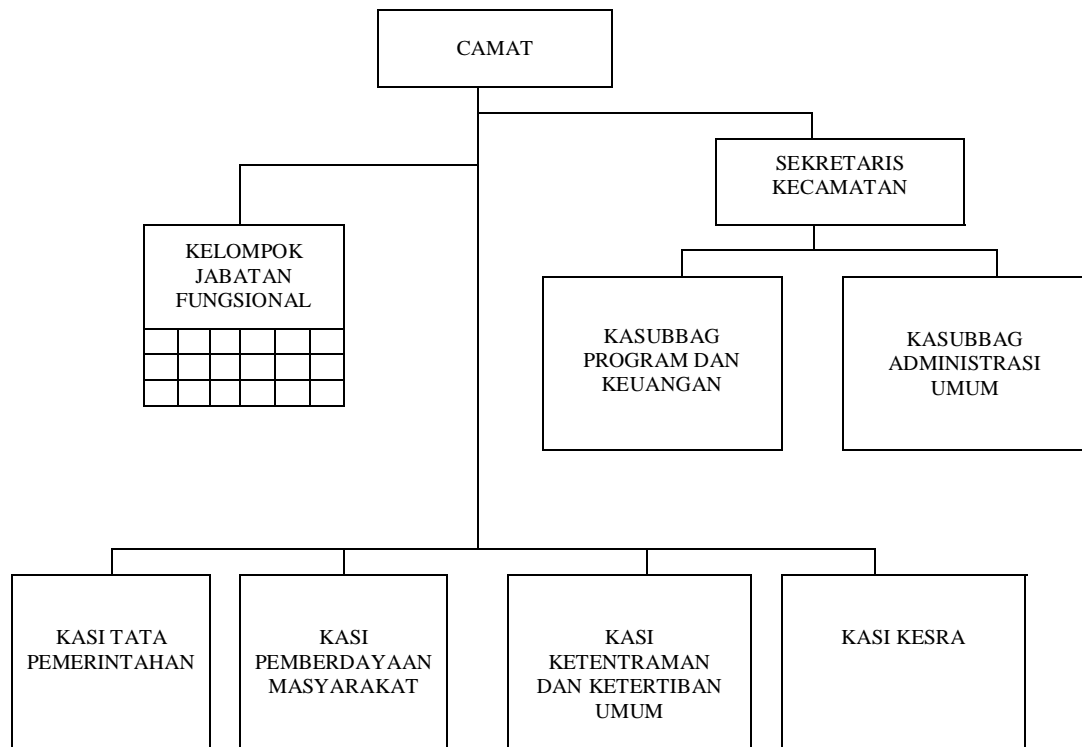
Tugas Kecamatan adalah membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh Bupati serta tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Kecamatan

Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintah yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
9. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; dan
11. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Magelang Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan terdiri atas Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan non struktural yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan seperti terlihat dalam bagan struktur organisasi berikut :



(Sumber : Data Subbag. Administrasi Umum Kecamatan Dukun , 2021)

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Dukun

Rincian tugas Jabatan Struktural pada kecamatan sampai dengan satu eselon di bawah Camat, sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Magelang Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Camat

Tugas pokok Camat adalah memimpin pelaksanaan tugas kecamatan yang meliputi pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan, peningkatan kesejahteraan rakyat, pemeliharaan ketentraman, ketertiban umum di wilayah kecamatan dan melaksanakan tugas kewenangan daerah yang dilimpahkan oleh bupati serta tugas lain yang dipeintahkan oleh perundang-undangan.

2. Sekretaris Kecamatan

Tugas pokok Sekretaris Kecamatan adalah memimpin pelaksanaan tugas kesekretariatan kecamatan yang meliputi perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pengelolaan data dan perencanaan, administrasi keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga dan barang daerah, pelayanan publik, pengkoordinasian pelaksanaan tugas seksi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan

Tugas Pokok Kepala Sub Bagian Program Dan Keuangan adalah memimpin pelaksanaan tugas Subbagian Program dan Keuangan yang meliputi penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Kepala Sub Bagian Administrasi Umum

Tugas Pokoknya melaksanakan tugas di bidang pengelolaan keuangan, surat menyurat, kearsipan dan dokumentasi produk hukum dan kegiatan, rumah tangga dan pengelolaan kepegawaian.

5. Kepala Seksi Pemerintahan

Tugas Pokoknya memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pertanahan, intensifikasi pajak dan retribusi daerah, komunikasi dan informatika, statistik, persandian serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Tugas Pokoknya memimpin pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan lembaga kemasyarakatan desa/kelurahan, perencanaan pembangunan wilayah kecamatan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, upaya pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian, pangan, peternakan dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil menengah, pariwisata, lingkungan hidup, kehutanan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

7. Kepala Seksi Ketenteraman, Ketertiban Umum

Tugas Pokoknya memimpin pelaksanaan tugas Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang pembinaan wawasan kebangsaan, upaya ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, penegakan 15 peraturan perundang-undangan daerah, penyalahgunaan narkoba, pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

8. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

Tugas Pokoknya memimpin pelaksanaan tugas Seksi Kesejahteraan Rakyat yang meliputi penyiapan bahan perumusan konsep kebijakan, pengkoordinasian, pelaksanaan, pengadministrasian, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan bidang koordinasi kegiatan keagamaan, penanggulangan kemiskinan, penanggulangan bencana, dan pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kebudayaan, kesehatan, sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, transmigrasi, serta melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Aparatur Kecamatan

Untuk melaksanakan tugas sesuai struktur yang ada, pada Kantor Kecamatan Dukun sampai dengan Bulan Oktober 2021 sebanyak 13 (tiga belas) orang. Keadaan pegawai berdasarkan jabatan, tingkat pendidikan, eselon dan golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Data Pegawai Kecamatan Dukun Tahun 2021

NO	NAMA	GOL	ESELON	TINGKAT PENDIDIKAN	JABATAN
1	NUR IMAN, S.Sos	IV b	III/a	S.1	Camat
2	UNTUNG SUJOKO, S.IP,MM	IV a	III/b	S.2	Sekcam
3	Dra. DWIYATMI SRI HARYATI	III/d	IV/a	S.1	Kasi Kesra
4	SUGENG PRIYATNO	III/c	IV/b	D.3	Kasubag Adm. Umum
5	NA'SIYAH, SE	III/c	IV/b	S.1	Kasubag Prpgram & Keuangan
6	AMBAR LISTYAWATI	III/b		SLTA	Pengelola Keamanan & Ketertiban
7	ROMADHON	III/a		S.1	Verifikator Keuangan
8	SUPANI	II/d		SLTA	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat & Kelembagaan
9	M. MUJI	II/d		SLTA	Pengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan

10	WINDARTO	II/d		SLTA	Pengolah Data Pelayanan
11	IQBAL HENDHARGO, A.Md	II/a		D.3	Pelaksana /Terampil - Arsiparis
12	FATCHUROCHMAN ALFATAH YASIN	II/a		D.3	Pelaksana/ Terampil - Pranata Komputer
13	PINDO KURNIAWAN	II/a		D.3	Pelaksana /Terampil - Pranata Komputer

Sumber : Subbag Admistrasi Umum, 2021

2.2.2 Aset/Modal

Selain personil yang menangani kegiatan diperlukan pula sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan pelayanan kepada masyarakat dan kegiatan perkantoran dapat berjalan lancar. Adapun aset yang dikelola oleh Kecamatan Dukun saat ini terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.2
Data Aset Kecamatan Dukun Tahun 2021

No	Jenis Aset	Nama Aset	Jumlah
1	Tanah dan Bangunan	Tanah	1.900 M2
		Gedung Kantor	4 unit
2	Alat Angkutan	Mobil	1 unit
		Sepeda Motor	7 unit
3	Alat Studio Komunikasi	Telepon	1 unit
		HT	4 unit
		Pengeras Suara/Sound	2 unit
		Kamera Digital	2 unit
4	Alat Kantor & Rumah tangga	Meja Kerja	16 unit
		Kursi Kerja	16 unit
		Komputer	3 unit
		Laptop	8 unit
		Printer	6 unit
		Rak Besi (Arsip)	5 unit
		Almari Kayu	5 unit
		Almari Besi	3 unit
		Filling Cabinet	8 unit
		Mesin Ketik	2 unit
		Kursi susun	195 unit
		MLCD Proyektor	1 unit
Papan Pengumuman	2 unit		

		Kotak Surat	1 unit
		Sruktur Organisasi	1 unit
		Lambang Garuda	2 unit
		Gb Presiden & WK	2 unit
		Podium	1 unit
		Meja Rapat	10 unit
		Meja kursi tamu	2 set
		Televisi	2 unit

Sumber : Data KIB 2021

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun

Nilai Kinerja Pelayanan Kecamatan Dukun dalam waktu satu tahun periode Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019 – 2024 sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini.

TABEL 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PRANGKAT DAERAH KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG 2019-2024

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI PD	TARGET SPM	TARGET IKK	TARGET INDIKATOR LAINYA	TARGET RENSTRA PD TAHUN KE					TARGET AKHIR TAHUN RENSTRA	REALISASI CAPAIAN TAHUN 2020	TINGKAT CAPAIAN TERHADAP TARGET AKHIR RENSTRA
					2020	2021	2022	2023	2024			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)				84.23 angka (0-100)	85.71 angka (0-100)	87.19 angka (0-100)	88.68 angka (0-100)	90.16 angka (0-100)	90.16 angka (0-100)		
	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan				82 angka (0-100)	83 angka (0-100)	84 angka (0-100)	85 angka (0-100)	86 angka (0-100)	86 angka (0-100)	88.07	102
	Persentase ketercapaian pelayanan umum dan kepegawaian perangkat daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1

Persentase ketercapaian perencanaan, evaluasi kinerja OPD dan keuangan perangkat daerah				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
Persentase Peningkatan Penyelenggaraan Kecamatan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
Persentase Kegiatan Yang di Koordinasikan				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1
Persentase Desa yang tertib administrasi				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	1

Sumber : LKJIP Kecamatan Dukun, Tahun 2020

TABEL 2.4
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2019 - 2024

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE					REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN 2020		RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN TAHUN		RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2020	2021	ANGGARAN	REALISASI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Manajemen Administrasi Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	232.000.000	232.000.000	232.000.000	232.000.000	232.000.000	127.854.840	NA	1	NA	NA	NA
Pengeluaran Surat Menyurat, Kearsipan dan Bahan Pustaka	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	2.601.000	NA	0	NA	NA	NA
Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi Perangkat Daerah	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	19.611.830	NA	0	NA	NA	NA
Pengadaan dan Pengelolaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung kantor /Rumah Dinas Gedung Pemerintah Lainnya	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	-	NA	-	NA	NA	NA
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor/Rumah Dinas Gedung Pemerintah Lainnya	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	42.000.000	46.059.179	NA	1	NA	NA	NA
Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor/Rumah Dinas Gedung Pemerintah Lainnya	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	38.037.831	NA	1	NA	NA	NA

Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung kantor/Rumah Dinas Gedung Pemerintah Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	NA	1	NA	NA	NA
Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur Sipil Negara	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	1.545.000	NA	0	NA	NA	NA
Program Perencanaan Keuangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	37.000.000	20.521.250	NA	1	NA	NA	NA
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	22.000.000	14.487.000	NA	1	NA	NA	NA
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.217.750	NA	0	NA	NA	NA
Penyusunan Laoran Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1.598.750	NA	0	NA	NA	NA
Penyusunan Dokumen Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perangkat Daerah	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	2.217.750	NA	0	NA	NA	NA
Program Pelayanan Publik Kecamatan	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2.893.100	NA	0	NA	NA	NA
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	2.893.100	NA	0	NA	NA	NA
Program Peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	217.000.000	217.000.000	217.000.000	217.000.000	217.000.000	67.743.800	NA	0	NA	NA	NA
Peningkatan Tata Kelola Kecamatan/Pemerintahan Desa/Kelurahan	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	13.703.300	NA	0	NA	NA	NA
Peningkatan Keberdayaan dan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	57.000.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000	57.000.000	19.499.000	NA	0	NA	NA	NA
Peningkatan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	12.785.000	NA	0	NA	NA	NA
Peningkatan Ketentraman dan Keteriban Umum serta Wawasan Kebangsaan	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	21.756.500	NA	1	NA	NA	NA

Sumber : LKJIP Kecamatan Dukun Tahun 2020

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Dukun

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Dukun dalam pengembangan pelayanan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010 - 2030, Kecamatan Dukun merupakan kawasan pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan, pariwisata dan UMKM. Selain itu sebagian besar wilayah Kecamatan Dukun merupakan kawasan rawan bencana alam letusan Gunung Merapi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam mewujudkan mitigasi dan masyarakat tanggap bencana. Disisi lain menjadi peluang dengan ketersediaan sumber daya alam yang cukup melimpah;
- b. Tantangan dalam pembangunan Kecamatan Dukun secara internal adalah kurangnya peralatan kantor (laptop) yang memadai sehingga dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
- c. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntutan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas. Dimana dari hasil analisis kinerja pelayanan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebelumnya, menunjukkan ketercapaian maksimal (100%) sehingga diperlukan penajaman indikator kinerja dalam dokumen perencanaan. Harapannya kinerja pelayanan menjadi lebih terukur dan obyektif;
- d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik dituntut peran Kecamatan Dukun harus lebih responsiv terhadap dinamika pembangunan masyarakat. Dengan kondisi Kecamatan Dukun yang memiliki 15 (lima belas) Desa dengan topografi dataran tinggi dan banyak sungai, diperlukan pola koordinasi yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan optimal;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal tanpa komplain menjadi tantangan guna mewujudkan kualitas pelayanan publik.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS KECAMATAN DUKUN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan Dukun

Kecamatan merupakan ujung tombak pelayanan publik. Permasalahan yang muncul di kecamatan adalah belum optimalnya pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan. Permasalahan tersebut disebabkan oleh belum optimalnya pemenuhan kebutuhan pelayanan publik kepada masyarakat dan belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan gambaran umum pelayanan Kecamatan Dukun dapat diidentifikasi akar masalah, masalah serta masalah pokoknya sebagai berikut:

TABEL 3.1
IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI
PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Urusan : KECAMATAN

NO	MASALAH POKOK	MASALAH	AKAR MASALAH
1	Belum optimalnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Belum optimalnya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
2		Belum optimalnya Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Belum optimalnya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan belum efektif
			Belum optimalnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
3		Belum optimalnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Belum optimalnya Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

4		Belum optimalnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Belum optimalnya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
---	--	---	--

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Selanjutnya berdasarkan hasil telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dapat kita identifikasi beberapa permasalahan pelayanan SKPD disertai dengan factor pendukung dan penghambatnya. Beberapa permasalahan pelayanan SKPD sebagai hasil telaah seperti dirumuskan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Telaah Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

Visi : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdayasaing dan Amanah
(SEDAYA AMANAH)

No	Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati	Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1	2	3	4	5	6
1	Mewujudkan Tata kelola Pemerintahan yang Amanah	Melaksanakan Pelayanan publik di Kecamatan.	1 Belum optimalnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Adanya system informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi.	Kurangnya kualitas SDM di bidang pelayanan.
				Adanya system teknologi informasi yang memadai sehingga koordinasi tetap bias dilaksanakan.	Masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait di wilayah kecamatan.

3.3 Telaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga dan Rencana Strategis Provinsi

Kecamatan merupakan perangkat daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pemerintah, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dengan tugas fungsi yang bersifat koordinatif, kecamatan tidak melaksanakan koordinasi langsung dengan kementerian / lembaga maupun dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, dalam dokumen ini tidak dilakukan telaah terhadap rencana strategis kementerian / lembaga maupun rencana strategis provinsi.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan atau aspek fungsional. Adapun kawasan merupakan wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya. Berdasarkan telaahan rencana struktur dan pola ruang terhadap kebutuhan pelayanan dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka dapat diidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan dan prioritas wilayah pelayanan Kecamatan Dukun dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030, Kecamatan Dukun dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW tersebut.

Mendasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Magelang Tahun 2010-2030 mengatur tentang rencana struktur ruang dan pola ruang di Kabupaten Magelang yang diantaranya memuat hal-hal strategis terkait dengan perkembangan Kecamatan Dukun, sebagai berikut :

A. Struktur Ruang

Rencana Struktur Ruang Kecamatan Dukun berdasarkan arahan pengembangan system pelayanan dan system jaringan prasarana wilayah meliputi :

1. Ibukota Kecamatan Dukun sebagai Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) dan Pusat Pelayanan Kawasan (PKL);
2. Pendukung pusat pertumbuhan Kecamatan Dukun dengan prioritas sebagai/pusat Kawasan Pengembangan Pertanian, Peternakan, Perikanan, Pariwisata (Pos Babadan), penghasil hortikultura, pusat pengembangan wisata alam;
3. Pengembangan Desa Sewukan sebagai desa pusat pertumbuhan dilakukan dengan menumbuhkan sektor pertanian;
4. Ibukota Kecamatan Dukun merupakan pengembangan Kawasan Perkotaan dalam system perwilayahan. Wilayah Pengembangan Perkotaan sesuai dengan potensi daerah dalam rangka menumbuhkan perekonomian wilayah Kabupaten dan sekitarnya.

B. Pola Ruang

Rencana Pola Ruang Wilayah Kecamatan Dukun meliputi :

1. Kawasan Lindung meliputi :

- a. Kawasan hutan lindung yang memiliki fungsi utama melindungi kelestarian sumber daya alam seperti tanah, air iklim, tumbuhan, keanekaragaman hayati, satwa, tipe ekosistem dan keunikan alam serta sumberdaya buatan seperti nilai budaya dan sejarah bangsa;
 - b. Kawasan yang memberikan perlindungan kawasan bawahannya berupa kawasan resapan air yang diperlukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi resapan air hujan pada daerah tertentu untuk keperluan penyediaan kebutuhan air tanah dan penanggulangan banjir;
 - c. Kawasan perlindungan setempat meliputi kawasan sektor mata air dan kawasan sempadan sungai. Kawasan sekitar mata air ditetapkan untuk melindungi mata air dari kegiatan budidaya yang dapat merusak kualitas air dan kondisi fisik kawasan sekitarnya;
 - d. Kawasan rencana bencana akan meliputi kawasan Gunung Merapi, tanah longsor, kawasan gerakan tanah kategori tinggi dan menengah.
2. Kawasan Budidaya meliputi :
 - a. Kawasan peruntukan hutan produksi;
 - b. Kawasan hutan rakyat;
 - c. Kawasan pertanian lahan basah;
 - d. Kawasan pertanian lahan kering;
 - e. Kawasan permukiman.

3.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Fungsi utama pemerintah kecamatan adalah pelayanan publik secara langsung kepada masyarakat desa dan penyelenggaraan koordinasi pemerintahan di tingkat desa. Hasil identifikasi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan di Kecamatan Dukun, pelayanan publik dan koordinasipenyelenggaraan pemerintahan menjadi permasalahan dari sisi akar masalah, masalah maupun masalah pokok.

Dari telaahan visi, misi, dan program Bupati Magelang Tahun 2019 – 2024, Kecamatan mengampu misi ketiga yaitu mewujudkan tata pemerintahan yang amanah. Hal ini sesuai dengan tugas dan fungsi kecamatan sebagaimanasudah diuraikan di atas. Hasil telaah menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi adalah belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan.

Terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, hasil telaah menunjukkan bahwa pelayanan juga menjadi permasalahan.

Berdasarkan beberapa telaahan dimaksud, pada akhirnya dapat diidentifikasi isu –isu strategis di Kecamatan Dukunadalah :

1. Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan;
2. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan kecamatan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Dukun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati lima tahun kedepan, yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Kecamatan Dukun sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Magelang dengan fungsi utama pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan, tidak bisa lepas dari tujuan dan sasaran daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

TABEL 4.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN DAN SASARAN	SATUAN	TAHUN						KONDISI AKHIR KINERJA
				2020		2021	2022	2023	2024	
				TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	1-100 Kriteria	83.75 Baik	88.07 Baik	84.5 Baik	85.25 Baik	85.25 Baik	86 Baik	86 Baik
		Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	1-100 Kriteria	82 Baik	88.07 Baik	83 Baik	84 Baik	85 Baik	86 Baik	86 Baik
		Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persen	NA %	NA %	100%	100%	100%	100%	100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan Kecamatan Dukun tetap mengacu dan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024. Relevansi, konsistensi dan koherensi antar dokumen Renstra ini dengan dokumen ini dengan dokumen lain diharapkan dapat menjadi salah satu sarana mewujudkan tujuan dan sasaran di level Kabupaten Magelang.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Magelang yang Sejahtera, Berdaya Saing dan Amanah (Sedaya Amanah)			
MISI : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Amanah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik di Kecamatan	Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat
		Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Meningkatkan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
			Meningkatkan efektifitas Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
			Meningkatkan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan
		Meningkatkan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Meningkatkan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
		Meningkatkan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa	Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

BAB VI
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN DUKUN
KABUPATEN MAGELANG

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Meningkatnya kualitas pelayanan publik				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83 (1-100) kriteria	0,00	83,75 (1-100) kriteria	1.618.417.030,00	84,5 (1-100) kriteria	1.649.602.722,00	85,25 (1-100) kriteria	1.646.866.620,00	86 (1-100) kriteria	1.745.417.432,00		
	Meningkatnya kinerja pelaksanaan teknis kewilayahan dan pelayanan publik di Kecamatan			Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	82 (Baik)	0,00	83 (Baik)	1.618.417.030,00	84 (Baik)	1.649.602.722,00	85 (Baik)	1.646.866.620,00	86 (Baik)	1.745.417.432,00		
				Persentase Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	NA %		NA %		100 %		100 %		100 %			
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Ketercapaian, Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	NA Persen	0,00	100 Persen	1.529.698.030,00	100 Persen	1.520.902.722,00	100 Persen	1.543.166.620,00	100 Persen	1.572.220.432,00		
				2. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	NA Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen		100 Persen			
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	NA dokumen	0,00	27 dokumen	6.542.000,00	26 dokumen	6.510.000,00	26 dokumen	6.510.000,00	27 dokumen	7.100.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	NA dokumen	0,00	1 dokumen	2.955.000,00	0 dokumen	2.955.000,00	0 dokumen	2.955.000,00	1 dokumen	3.000.900,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
				2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	NA dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen		2 dokumen			
				3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	NA dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			
				4. Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	NA dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen		1 dokumen			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah dokumen Laporan tahunan yang tersusun 2. Jumlah Dokumen SOP yang tersusun 3. Jumlah Dokumen SP yang tersusun 4. Jumlah Dokumen Daftar Informasi Publik yang tersusun 5. Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP) 6. Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	NA dokumen NA dokumen NA dokumen NA dokumen NA dokumen NA dokumen	0,00	4 dokumen 10 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2.555.000,00	4 dokumen 10 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2.555.000,00	4 dokumen 10 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2.555.000,00	4 dokumen 10 dokumen 1 dokumen 5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	2.600.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Laporan Tribunalan, yang tersusun 2. Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun 3. Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun	NA dokumen NA dokumen NA dokumen	0,00	8 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	1.032.000,00	8 dokumen 12 dokumen 0 dokumen	1.000.000,00	8 dokumen 12 dokumen 0 dokumen	1.000.000,00	8 dokumen 12 dokumen 1 dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	NA kegiatan	0,00	9 kegiatan	1.400.836.000,00	12 kegiatan	1.400.836.000,00	12 kegiatan	1.382.971.000,00	12 kegiatan	1.385.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	NA Bulan	0,00	14 Bulan	1.367.971.000,00	14 Bulan	1.367.971.000,00	14 Bulan	1.367.971.000,00	14 Bulan	1.350.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	NA dokumen	0,00	12 dokumen	32.865.000,00	12 dokumen	32.865.000,00	12 dokumen	15.000.000,00	12 dokumen	35.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Yang dikelola	NA barang	0,00	390 barang	0,00	392 barang	0,00	394 barang	1.500.000,00	395 barang	1.500.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Tersusun	NA dokumen	0,00	2 dokumen	0,00	2 dokumen	0,00	2 dokumen	1.500.000,00	2 dokumen	1.500.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaianya	NA orang	0,00	13 orang	0,00	13 orang	1.000.000,00	13 orang	4.500.000,00	13 orang	4.500.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Jumlah ASN Yang Terfasilitasi Penilaian Kinerjanya 2. Jumlah JFT Yang Terfasilitasi Penilaian Angka Kreditnya	NA orang NA orang	0,00	13 orang 0 orang	0,00	13 orang 3 orang	1.000.000,00	13 orang 3 orang	1.500.000,00	13 orang 3 orang	1.500.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekwensi Pembinaan ASN	NA kali	0,00	0 kali	0,00	1 kali	0,00	1 kali	3.000.000,00	1 kali	3.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	NA layanan	0,00	8 layanan	19.174.030,00	8 layanan	5.020.722,00	8 layanan	8.149.920,00	8 layanan	13.071.432,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	NA buku	0,00	50 buku	0,00	50 buku	0,00	50 buku	0,00	50 buku	5.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan 2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana 3. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	NA kali NA kali NA layanan	0,00	6 kali 10 kali 0 layanan	4.700.000,00	12 kali 20 kali 20 layanan	4.700.000,00	12 kali 20 kali 20 layanan	4.700.000,00	25 kali 20 layanan	5.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	NA Arsip	0,00	1000 Arsip	14.474.030,00	1150 Arsip	320.722,00	1250 Arsip	3.449.920,00	1400 Arsip	3.071.432,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	NA paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	2 paket	30.900.000,00	2 paket	23.900.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel / Perlengkapan Gedung Kantor	NA paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	10.900.000,00	1 paket	20.900.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Na paket	0,00	0 paket	0,00	0 paket	0,00	1 paket	20.000.000,00	1 paket	3.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA layanan	0,00	2 layanan	20.625.000,00	2 layanan	25.035.000,00	2 layanan	25.035.000,00	2 layanan	25.038.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	NA surat	0,00	1500 surat	5.025.000,00	1800 surat	5.025.000,00	1900 surat	5.025.000,00	2000 surat	5.028.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun	NA rekening bulan	0,00	36 rekening bulan	15.600.000,00	24 rekening bulan	20.010.000,00	24 rekening bulan	20.010.000,00	24 rekening bulan	20.010.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	NA Unit	0,00	16 Unit	82.521.000,00	16 Unit	82.501.000,00	47 Unit	83.600.700,00	47 Unit	112.111.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara 2. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	NA Unit NA Unit	0,00	1 Unit 7 Unit	45.083.000,00	1 Unit 7 Unit	45.103.000,00	1 Unit 7 Unit	45.202.700,00	1 Unit 7 Unit	49.111.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel / Perlengkapan yang dipelihara	NA unit	0,00	0 unit	0,00	0 unit	0,00	31 unit	1.000.000,00	31 unit	1.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	NA unit	0,00	8 unit	2.040.000,00	8 unit	2.000.000,00	8 unit	2.000.000,00	8 unit	2.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1. Jumlah TP PKK Desa yang dibina 2. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina 3. Jumlah LPMD Yang Dibina 4. Jumlah Karang Taruna Yang Dibina 5. Jumlah RW Yang dibina 6. Jumlah RT Yang Dibina	NA Desa NA Desa NA Desa NA Desa NA Desa NA Desa	0,00	15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa	16.429.000,00	15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa	29.500.000,00	15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa	20.000.000,00	15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa 15 Desa	20.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03.04	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes yang dibina	NA BUMDes	0,00	NA BUMDes	0,00	NA BUMDes	0,00	15 BUMDes	3.500.000,00	15 BUMDes	5.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan	NA Persen	0,00	100 Persen	20.132.000,00	100 Persen	27.000.000,00	100 Persen	25.000.000,00	100 Persen	25.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	NA laporan	0,00	8 laporan	20.132.000,00	12 laporan	27.000.000,00	12 laporan	25.000.000,00	12 laporan	25.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.04.2.01.01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. 1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan 2. 2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana 3. 3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina 4. 4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	NA kali NA Desa NA orang NA orang	0,00	0 kali 15 Desa 0 orang 0 orang	20.132.000,00	12 kali 15 Desa 30 orang 0 orang	27.000.000,00	12 kali 15 Desa 30 orang 80 orang	25.000.000,00	15 Desa 30 orang 80 orang	25.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yang dikordinasikan	NA Persen	0,00	100 Persen	19.812.000,00	100 Persen	40.000.000,00	100 Persen	23.000.000,00	100 Persen	90.997.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	NA Desa	0,00	15 Desa	19.812.000,00	15 Desa	40.000.000,00	15 Desa	23.000.000,00	15 Desa	90.997.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun	NA Peraturan	0,00	0 Peraturan	0,00	0 Peraturan	0,00	1 Peraturan	2.000.000,00	2 Peraturan	5.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina administrasinya	NA Desa	0,00	15 Desa	2.640.000,00	15 Desa	2.500.000,00	15 Desa	2.500.000,00	15 Desa	2.500.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara 2. Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	NA M2	0,00	1054 M2	35.398.000,00	1054 M2	35.398.000,00	1054 M2	35.398.000,00	1054 M2	60.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	NA Persen	0,00	100 Persen	24.000.000,00	100 Persen	26.200.000,00	100 Persen	26.200.000,00	100 Persen	26.200.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani	NA dokumen	0,00	1 dokumen	24.000.000,00	1 dokumen	26.200.000,00	1 dokumen	26.200.000,00	1 dokumen	26.200.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.04.01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen layanan perizinan non usaha	NA dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	0 dokumen	0,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.02.2.04.02	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen layanan non perizinan	NA dokumen	0,00	1200 dokumen	24.000.000,00	1200 dokumen	26.200.000,00	1200 dokumen	26.200.000,00	1200 dokumen	26.200.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang tertib administrasi	NA Persen	0,00	82 Persen	24.775.000,00	84 Persen	35.500.000,00	85 Persen	29.500.000,00	86 Persen	31.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	NA Desa	0,00	15 Desa	8.346.000,00	15 Desa	6.000.000,00	15 Desa	6.000.000,00	15 Desa	6.000.000,00		
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	NA dokumen	0,00	15 dokumen	785.000,00	15 dokumen	1.000.000,00	15 dokumen	1.000.000,00	15 dokumen	1.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.01.03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa 2. Jumlah dokumen profil desa yang tersusun 3. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya 4. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaan 5. Jumlah desa layak anak 6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya 7. Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	NA Desa	0,00	15 Desa	7.561.000,00	15 Desa	5.000.000,00	15 Desa	5.000.000,00	15 Desa	5.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	NA lembaga	0,00	5 lembaga	16.429.000,00	5 lembaga	29.500.000,00	5 lembaga	23.500.000,00	5 lembaga	25.000.000,00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
					2020		2021		2022		2023		2024			
					Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa 2. Jumlah desa lunas PBB	NA Desa	0,00	15 Desa	3.000.000,00	15 Desa	5.500.000,00	15 Desa	3.500.000,00	15 Desa	5.500.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.04	Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	NA Peraturan	0,00	2 Peraturan	582.500,00	NA Peraturan	0,00	2 Peraturan	2.000.000,00	2 Peraturan	5.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.05	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terbina	NA orang	0,00	30 orang	1.431.500,00	NA orang	0,00	30 orang	2.000.000,00	30 orang	5.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.06	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa terpilih	NA Desa	0,00	NA Desa	0,00	1 Desa	27.000.000,00	NA Desa	0,00	2 Desa	47.997.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina	NA orang	0,00	NA orang	0,00	NA orang	0,00	30 orang	2.000.000,00	30 orang	5.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.08	Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa Terisi	NA orang	0,00	NA orang	0,00	NA orang	0,00	NA orang	3.000.000,00	NA orang	5.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.09	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	NA orang	0,00	52 orang	3.524.000,00	55 orang	5.000.000,00	55 orang	6.000.000,00	70 orang	10.000.000,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
		7.01.7.01.0.00.0.00.06.0000.06.2.01.11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan 2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana 3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina 4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	NA kali	0,00	12 kali	8.634.000,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	0 kali	0,00	KECAMATAN DUKUN	KECAMATAN DUKUN
Jumlah						0,00		1.618.417.030,00		1.649.602.722,00		1.646.866.620,00		1.745.417.432,00		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD melalui pelaksanaan program dan kegiatan.

Indikator Kinerja SKPD Kecamatan Dukun beserta target kinerjanya selama 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

TABEL 7.1
PENETAPAN INDIKATOR UTAMA PERANGKAT DAERAH
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN DUKUN
TAHUN 2019 – 2024

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH	SATUAN	CAPAIAN TAHUN						KONDISI AKHIR KINERJA
			2020		2021	2022	2023	2024	
			TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET	
1.	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	1-100 Kriteria	83.75 Baik	88.07 Baik	84.5 Baik	85.25 Baik	85.25 Baik	86 Baik	86 Baik
	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat Kecamatan (SKM)	1-100 Kriteria	82 Baik	88.07 Baik	83 Baik	84 Baik	85 Baik	86 Baik	86 Baik
	Persentase peningkatan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan	Persen	NA %	NA %	100%	100%	100%	100%	100%

Selain IKU Perangkat Daerah juga ditetapkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan masing – masing Perangkat Daerah yang ditampilkan dalam Tabel berikut :

TABEL 7.2
INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Satuan	CAPAIAN TAHUN						Kondisi Akhir Kinerja pada Akhir RPJMD	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			2020		2021	2022	2023	2024			
			TARGET	REALISASI	TARGET	TARGET	TARGET	TARGET			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase Ketercapaian, Perencanaan, Evaluasi Kinerja OPD dan Keuangan Perangkat Daerah	Persen	NA	0	100	100	100	100	100	100	Kecamatan Dukun
	2. Persentase Ketercapaian Pelayanan Umum dan Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	NA	0	100	100	100	100	100	100	

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan evaluasi dan pelaporan perangkat daerah	Dokumen	NA	0	27	26	26	26	26
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	NA	0	1	0	0	1	1
	2. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	NA	0	2	2	2	2	2
	3. Jumlah Dokumen Rencana Kerja Operasional yang tersusun	Dokumen	NA	0	1	1	1	1	1
	4. Jumlah Dokumen RPTK yang tersusun	Dokumen	NA	0	1	1	1	1	1
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Jumlah dokumen Laporan tahunan yang tersusun	Dokumen	NA	0	4	4	4	4	4

	2. Jumlah Dokumen SOP yang tersusun	Dokumen	NA	0	10	10	10	10	10	
	3. Jumlah Dokumen SP yang tersusun	Dokumen	NA	0	1	1	1	1	1	
	4. Jumlah Dokumen Daftar Informasi Publik yang tersusun	Dokumen	NA	0	5	5	5	5	5	
	5. Jumlah dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang tersusun (RTP dan Evaluasi RTP)	Dokumen	NA	0	1	1	1	1	1	
	6. Jumlah dokumen data perangkat daerah yang tersusun	Dokumen	NA	0	1	1	1	1	1	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah Dokumen Laporan Tribulanan yang tersusun	Dokumen	NA	0	8	8	8	8	8	
	2. Jumlah Dokumen Laporan Bulanan yang tersusun	Dokumen	NA	0	12	12	12	12	12	

	3. Jumlah dokumen evaluasi Renstra yang tersusun	Dokumen	NA	0	1	0	0	1	1	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan yang dikelola	Kegiatan	NA	0	9	12	12	12	12	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah bulan penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Bulan	NA	0	14	14	14	14	14	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan yang tersusun	Dokumen	NA	0	12	12	12	12	12	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Aset Yang dikelola	Barang	NA	0	390	392	394	395	395	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKP	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada SKPD Yang Tersusun	Dokumen	NA	0	2	2	2	2	2	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN Yang Terlayani Administrasi Kepegawaiannya	Orang	NA	0	13	13	13	13	13	

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1. Jumlah ASN Yang Terfasilitasi Penilaian Kinerjanya	Orang	NA	0	13	13	13	13	13
	2. Jumlah JFT Yang DUKUN Terfasilitasi Penilaian Angka Kreditnya	Orang	NA	0	3	3	3	3	3
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Frekwensi Pembinaan ASN	Kali	NA	0	0	1	1	1	1
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pelayanan Administrasi Umum yang dilaksanakan	Layanan	NA	0	8	8	8	8	8
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan pustaka yang dikelola	Buku	NA	0	50	50	50	50	50
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan	Kali	NA	0	6	12	12	12	12
	2. Jumlah perjalanan dinas dalam daerah yang terlaksana	Kali	NA	0	10	20	20	20	20

	3. Jumlah layanan humas dan protokol yang dilaksanakan	Layanan	NA	0	0	20	20	20	20	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah arsip yang dikelola	Arsip	NA	0	1.000	1.150	1.250	1.400	1.400	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Paket Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Paket	NA	0	0	0	2	2	2	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Pengadaan Mebel / Perlengkapan Gedung Kantor	Paket	NA	0	0	0	1	1	1	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Paket Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Paket	NA	0	0	0	1	1	1	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Layanan	NA	0	2	2	2	2	2	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikelola	Surat	NA	0	1.500	1.800	1.900	2.000	2.000	

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening yang dibayar selama satu tahun	Rekening	NA	0	36	24	24	24	24
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Barang	NA	0	16	16	47	47	47
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Jumlah kendaraan dinas roda empat yang dipelihara	Mobil	NA	0	1	1	1	1	1
	2. Jumlah kendaraan dinas roda dua yang dipelihara	Motor	NA	0	7	7	7	7	7
Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel / Perlengkapan yang dipelihara	Unit	NA	0	0	0	31	31	31
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan yang dipelihara	Unit	NA	0	8	8	8	8	8

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Luas gedung kantor yang dipelihara	M2	NA	0	1.054	1.054	1.054	1.054	1.054	
	2. Jumlah paket rehabilitasi sedang / berat gedung kantor	Paket	NA	0	0	0	0	1	1	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase pelayanan publik sesuai SOP dan SP	Persen	NA	0	100	100	100	100	100	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah dokumen yang terlayani	Dokumen	NA	0	1	1	1	1	1	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah dokumen layanan non perizinan	Dokumen	NA	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase desa yang tertib administrasi	Persen	NA	0	82	84	85	86	86	
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Tertib Administrasi	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	

Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah dokumen perencanaan desa yang tersusun	Dokumen	NA	0	1	1	1	1	1	
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah desa yang terfasilitasi bantuan keuangan kepada desa	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
	2. Jumlah dokumen profil desa yang tersusun	Dokumen	NA	0	1	1	1	1	1	
	3. Jumlah desa terkoordinasi penanggulangan kemiskinannya	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
	4. Jumlah peserta yang dilatih dan dikirimkan dalam lomba kebudayaa	Orang	NA	0	0	0	10	10	10	
	5. Jumlah desa layak anak	Desa	NA	0	0	15	15	15	15	

	6. Jumlah kegiatan penyelenggaraan festival budaya	Kali	NA	0	0	0	1	1	1	
	7. Jumlah Desa Yang Terfasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	Lembaga	NA	0	5	5	5	5	5	
Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	1. Jumlah TP PKK Desa yang dibina	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
	2. Jumlah lembaga kemasyarakatan desa yang dibina	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
	3. Jumlah LPMD Yang Dibina	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
	4. Jumlah Karang Taruna Yang Dibina	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
	5. Jumlah RW Yang dibina	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
	6. Jumlah RT Yang Dibina	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	

Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah BUMDes yang dibina	Desa	NA	0	0	0	15	15	15
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Koordinasi Penanganan Masalah Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan	Persen	NA	0	100	100	100	100	100
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan penyelenggaraan koordinasi Ketenteraman, Ketertban Umum dan kebencanaan di tingkat Kecamatan	Laporan	NA	0	8	12	12	12	12
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	Kali	NA	0	0	12	12	12	12

	2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana		NA	0	15	15	15	15	15	
	3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina		NA	0	0	30	30	30	30	
	4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina		NA	0	0	0	80	80	80	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase kegiatan yang dikoordinasikan	Persen	NA	0	100	100	100	100	100	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Terfasilitasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Perdes dan Peraturan Kepala Desa Yang Tersusun	Peraturan	NA	0	0	0	1	2	2	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang terbina administrasinya	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	

Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	1. Jumlah desa Yang terfasilitasi pengelolaan keuangan desa	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
	2. Jumlah desa lunas PBB	Desa	NA	0	15	15	15	15	15	
Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah peraturan perundang-undangan yang disosialisasikan	Peraturan	NA	0	2	0	2	2	2	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah perangkat desa yang terbina	Orang	NA	0	30	0	30	30	30	
Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah kepala desa terpilih	Desa	NA	0	0	1	0	1	1	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah anggota BPD yang terbina	Orang	NA	0	0	0	30	30	30	
Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Perangkat Desa Terisi	Orang	NA	0	0	0	7	0	0	

Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah peserta musrenbang Kecamatan	Orang	NA	0	52	55	55	70	70
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1. Jumlah/frekwensi koordinasi forum komunikasi pimpinan kecamatan	Kali	NA	0	12	0	0	0	0
	2. Jumlah desa yang terfasilitasi penanggulangan bencana	Desa	NA	0	0	0	0	0	0
	3. Jumlah Satlinmas desa yang dibina	Orang	NA	0	0	0	0	0	0
	4. Jumlah anggota Paskibra yang terbina	Orang	NA	0	0	0	0	0	0

BAB VIII

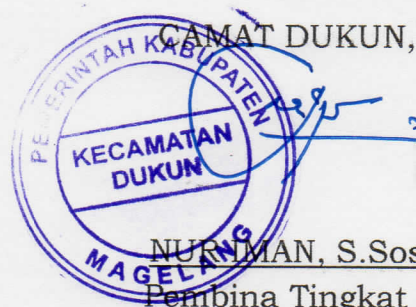
PENUTUP

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024 merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Dukun untuk periode 5 (lima) tahun. Perubahan Renstra ini disusun sebagai penjabaran atas Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang Tahun 2019 - 2024 ditekankan pada perubahan untuk perencanaan 3 (tiga) tahun terakhir masa Renstra, yaitu untuk perencanaan Tahun 2022, 2023 dan 2024. Perubahan tersebut mencakup perubahan sasaran perangkat daerah, program/kegiatan/sub kegiatan dan indikator sasaran, program (outcome) dan kegiatan(output).

Dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini diharapkan dapat menjadi landasan operasional pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan Dukun.

Dukun, 27 Oktober 2021



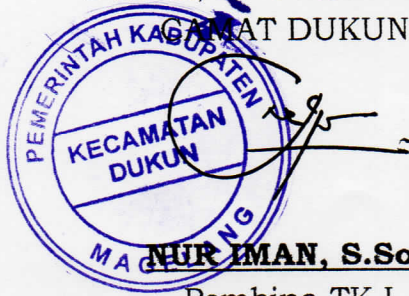
NUJUMAN, S.Sos
Pembina Tingkat I

NIP. 19650112 198603 1 014

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Perubahan Renstra Kecamatan Dukun Tahun 2019-2024 akan saya laksanakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran Kecamatan Dukun, serta mendukung pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019-2024.

Dukun, 27 Oktober 2021



NUR IMAN, S.Sos

Pembina TK I

NIP 19650112 198603 1 014